

# **Pendidikandan Politik diIndonesia**

## ***Education and Politics in Indonesia***

Nanik Kristanto  
[nanikkris07@gmail.com](mailto:nanikkris07@gmail.com)  
e-ISSN: 2716-2885

*Sekolah Tinggi Teologi Duta Panisal*  
*Jl. Cempaka 48, Gebang 68117, Jawa Timur*  
*Telepon (0331) 426535*

---

### **ABSTRACT**

Education and politics are two inseparable notions. If you look at the world of field these two things are interrelated with one another. politics as a control tool in the government system, while education is one of the important pillars in the government system so that education will be affected by the political system of government. Politics will also be affected by the education system in the long run. Education in Indonesia can never be separated from politics. Politics is very easily influenced and determined by political elites and political parisapsi that produce political ethics. Political elites are actors who rule and make wisdom when in power. Elite and power are never separated from each other. Education in Indonesia was never separated from the ruling political elites at the time. With education in Indonesia, educated people will not be easy to be influenced and contaminated by political slogans using religion as false labels. Let the government continue to strive to advance education and educate the nation's life. So that Indonesia remains a country of nationalism.

**Keywords:**Education, Politics, Indonesian.

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Pengertian Istilah**

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi dibawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Dalam bahasa Inggris, kata pendidikan disebut dengan *education* dimana secara etimologis berasal dari kata latin *Eductum*, terdiri dari *E* artinya perkembangan dari dalam keluar. Dan *Duco* artinya sedang berkembang, sehingga arti keseluruhannya adalah proses mengembangkan

kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Dalam konteks Indonesia, menurut undang-undang No 20 tahun 2003 pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

## 2. Jenis Jenis Pendidikan di Indonesia

- a. Pendidikan formal (SD, SMP, SMA, dst).
- b. Pendidikan non-formal (sanggar, lembaga2 kursus, kelompok belajar dan lembaga pelatihan).
- c. Pendidikan informal/ berasal dari keluarga dan lingkungan dan belajar secara mandiri (agama, budi pekerti, sopan santun, moral dll).

## 3. Sejarah Pendidikan

Dimulai dari zaman *helenisme* (150sM-500 m), masuk ke zaman pertengahan (500-1500) dan masuk ke zaman *Humanisme* atau *Renaissance* serta Reformasi dan kontra Reformasi (1600 an).Setelah zaman Reformasi, pendidikan dunia baru dipengaruhi oleh zaman-zaman berikutnya.

## 4. Sejarah Pendidikan Dunia/ Umum:

- a. Zaman Realisme;
- b. Zaman Rasionalisme;
- c. Zaman Naturalisme;
- d. Zaman Developmentalisme;
- e. Zaman Nasionalisme;
- f. Zaman Liberalisme, Positivisme dan Individualisme;
- g. Zaman Sosialisme.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Yolanda Sara, 'Sejarah Pendidikan Dunia', 2019 <<https://www.academia.edu>> [accessed 12 June 2019].

Kitamelihat setiap perkembangan zaman dalam dunia pendidikan umum, yang nantinya juga berdampak kepada pendidikan dan politik di Indonesia:<sup>2</sup>

**a. Zaman Realisme.**

Terjadinya perubahan kiblat dari pendidikan yang sebelumnya berfokus kepada dunia ide, dunia surga dan akherat menuju kepada dunia nyata dan semua keadaannya. Pengamatan indera dan juga persepsi penginderaan jadi metode yang penting. Tokoh-tokoh penting gerakan *realisme* adalah Francis Bacon dan Johann Amos Comenius. Pada zaman ini pendidikan lebih dihargai daripada pengajaran, karena pendidikan dihasilkan oleh aktifitas diri sendiri. Pengertian lebih dihargai daripada hafalan, disesuaikan dengan usia anak. Pelajaran harus diberikan satu persatu atau berjenjang, dari yang paling mudah. Metode berpikir induktif (menemukan fakta-fakta khusus, dianalisa dan ada kesimpulan). Bersifat demokratis, semua orang harus mendapatkan kesempatan yang sama.

**b. Zaman Rasionalisme.**

Memberikan kekuasaan kepada manusia utk berpikir sendiri dan bertindak sendiri. Ajaran ini berasal dari John Locke, dengan teori Leon Tabularasa yaitu mendidik seperti menulis dikertas putih dan dengan kebebasan dan kekuatan akal manusia digunakan untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Teori kebebasan jiwa ini bisa menuju kearah yang negatif seperti *intelektualisme*, *individualisme* dan *materialisme*.

**c. Zaman Naturalisme.**

Reaksi dari *rasionalisme* yang menentang kehidupan yang tidak wajar akibat *rasionalisme*. Tokohnya adalah J.J. Rousseau dengan prinsip keseimbangan antara rasio dengan hati yang akhirnya pendidikan dilaksanakan secara natural/alamiah. Manusia yang didorong oleh kebutuhan-kebutuhan alamiahnya dapat menemukan jalan kebenaran didalam dirinya sendiri.

---

<sup>2</sup>Yolanda Sara, 'Sejarah Pendidikan Dunia', 2019 <<https://www.academia.edu>> [accessed 12 June 2019].

d. Zaman Developmentalisme.

Berkembang pada abad 19, dengan tokoh-tokoh Pestalozzi, Johan Fredrich Herbart, prinsip-prinsipnya adalah pendidikan sebagai suatu proses pengembangan jiwa, sehingga sering disebut sebagai gerakan *psikologis*.

Salah satu metodenya mengaktifkan potensi anak yang masih tersembunyi dan membentuk watak susila dan kepribadian yang harmonis dan dijalankan sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangan anak-anak.

f. Zaman Nasionalisme.

Pada zaman ini pendidikan berusaha membentuk patriot-patriot bangsa dari penjajahan imperialis. Tokoh-tokohnya adalah La Chatolais (Perancis) dan Fichte (Jerman). Ajaran-ajarannya mengutamakan pendidikan sekuler, jasmani dan kejuruan. Materi pelajaran meliputi bahasa, kesusasteraan nasional, pendidikan kewarganegaraan, sejarah negara, geografi negara, lagu-lagu kebangsaan dan pendidikan jasmani. Akibat buruk dari *nasionalisme* adalah *Chaufinisme*, yaitu kegilaan dan kecintaan terhadap tanah air yang berlebihan yang akhirnya menjadi ultra nasionalis seperti Hitler.

g. Zaman Liberalisme, Positivisme dan Individualisme.

August Conte adalah tokoh gerakan ini. Bagi Conte pendidikan adalah alat untuk memperkuat kedudukan penguasa yang dipelopori dalam bidang ekonomi, siapa yang banyak pengetahuan dialah yang paling berkuasa. Hal ini mengakibatkan *individualisme* dan *positivisme*, yakni pendidikan yang berdasar kepada pengamatan panca indra, sehingga kepercayaan agama menjadi lemah.

h. Zaman Sosialisme.

Muncul pada abad 20 sebagai dampak *liberalisme*, *positivisme* dan *individualisme*. Tokoh-tokohnya adalah Paul Nartrop dan John Dewey. Ajarannya adalah masyarakat lebih penting dari individu dan pendidikan harus diabdikan untuk tujuan-tujuan sosial. Di *zamansosialisme* kita melihat setiap perkembangan zaman dalam dunia

pendidikan umum, yang nantinya juga berdampak kepada pendidikan dan politik di Indonesia.<sup>3</sup>

## 5. Sejarah Pendidikan Di Indonesia.

### a. Zaman Pengaruh Hindu dan Budha.

Abad ke-5 pendidikan bertujuan menyebarkan dan membina keberagaman Hindu dan Budha sebab keduanya terkadang terjadi *sinkretisme*. Bhineka Tunggal Ika artinya berbeda beda tetapi tetap satu yaitu Sang Maha Tunggal Tuhan semesta alam.

### b. Zaman Pengaruh Islam / Tradisional.

Abad ke-13 sampai 16, pendidikan yang bersifat tradisional dimana pendidikan dengan agama Islam yaitu mengabdikan kepada Allah SWT dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dijalankan secara sporadis oleh ulama-ulama di setiap daerah.

### c. Zaman Pengaruh Kristen dan Katolik.

Pendidikan dan pengajaran sekolah yang didasarkan oleh iman Kristen dan Katolik. Jadi iman Kristen atau Katolik mendasari segala aspek pendidikan mulai dari guru-guru, staff pengajar, kurikulum, lingkungan belajar, peraturan-peraturan sekolah sehingga sekolah Kristen dan Katolik menjadikan lingkungan yang sungguh-sungguh Kristen dan Katolik.

### d. Zaman Kolonial Belanda.

Zaman ini pendidikan sangat diwarnai oleh kepentingan ekonomi dan politik di Indonesia. Sekolah pertama didirikan VOC di Ambon pada tahun 1607. Pelajaran yang diberikan berupa membaca, menulis dan sembahyang. Sebagai gurunya diangkat orang Belanda yang mendapat upah.<sup>4</sup> Sistem dibuat berjenjang, tidak berlaku untuk semua kalangan, utk anak-anak Belanda dibuat lebih berkualitas daripada anak-anak Indonesia. Hal ini dibuat supaya tenaga Indonesia/pribumi lebih

---

<sup>3</sup>Yolanda Sara, 'Sejarah Pendidikan Dunia', 2019 <<https://www.academia.edu>> [accessed 12 June 2019].

<sup>4</sup>Putri Rahma, 'Sejarah Pendidikan Di Indonesia', 2015 <. Kompasiana.com, sejarah pendidikan di Indonesia> [accessed 30 June 2019].

murah daripada Belanda. Dianjurkan pelajar mengerti bahasa Belanda demi kelancaran komunikasi, dan krisis dunia malaise membuat penyediaan guru-guru tidak sesuai dengan profesionalitas karena keterbatasan dana yang ada. Pendidikan semakin sulit dan mahal dan dibuatlah sekolah-sekolah desa yang murah.

e. Zaman Kolonial Jepang (7 Maret 1942-17 Agustus 1945).

Pendidikan semakin menyedihkan dan dibuat untuk tenaga cuma-cuma (romusha) Jepang. Pendidikan pada masa Jepang memiliki landasan *idiil hakko icu* yang mengajak semua pelajar bekerja sama mencapai kemakmuran Asia raya. Yang ada hanya sekolah rakyat (*Kokomin Gakko*) yang memberikan pendidikan selama 6 tahun, sekolah menengah yang dibuka ialah *Cu Gakko* (laki-laki) dan *Zyu Gakko* (perempuan) yang lama pendidikannya 3 tahun.

Selain sekolah menengah, banyak pula didirikan sekolah kejuruan, yang terbanyak ialah sekolah guru, Jepang menganggap sekolah guru penting sekali, karena sekolah itu yang akan menyiapkan tenaga dalam jumlah yang besar untuk memompakan dan memprogandakan semangat Jepang kepada anak didik. Pelajar harus mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran dan indoktrinasi yang kuat.

f. Zaman Orde Lama (1950-1966).

Mulai ada pembaharuan pendidikan dengan program pemberantasan buta huruf yang mencapai 40% jumlah penduduk, mengadakan kursus-kursus guru kilat selama 2 tahun dan merestorasi gedung-gedung sekolah negeri.

Prinsipnya tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Memilih pendidikan adalah hak setiap orang dan bebas. Adanya pengawasan pemerintah pada materi pendidikan supaya tidak terpapar paham-paham yang terlarang.

g. Zaman Orde Baru.

Pendidikan berorientasi pada pembentukan manusia Pancasila, untuk membentuk mental masyarakat sebagai pilar kekuatan orde baru. Tujuan pendidikan sesuai pasal 4 Tap MPRS nomor XXII/ MPRS/ 1966 adalah:

- Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama;

- Mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan;
- Membina/ mengembangkan fisik yang kuat dan sehat;
- Mulai dibentuk badan pengembangan pendidikan yang bertugas;
- Mengkoordinasikan serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang pendidikan;
- Mengadakan eksperimen-eksperimen dan proyek-proyek perintis dalam rangka pengembangan pendidikan;
- Menyiapkan rencana, program dan kebijaksanaan utk menteri pendidikan dan kebudayaan.

#### h. Zaman Reformasi (1998 Sampai Sekarang).

Masalah reformasi yaitu krisis politik, krisis hukum, krisis sosial dan krisis kepercayaan sangat mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Dimulai dengan memberi ruang yang besar bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat *revolusioner* dan *reformatif*. Pelaksanaan pendidikan berubah dari *sentralistik* (orde baru) menjadi *desentralistik*. Memprioritaskan pendidikan dengan mengalokasikan minimal 20% APBN. Kurikulum disusun Berbasis Kompetensi (KBK) dengan karakteristik sebagai berikut:

- Menekankan kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi.
- Kurikulum dapat diperluas, diperdalam dan disesuaikan dengan potensi siswa.
- Berpusat pada siswa.
- Orientasi pada proses dan hasil.
- Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual.

#### 6. Tantangan Pendidikan Di Indonesia.

- a. Angkatan kerja yang tidak bisa berkompetensi dalam lapangan kerja global;
- b. Birokrasi yang lamban, korup dan tidak kreatif;
- c. Masyarakat luas yang mudah bertindak anarkhis;
- d. Sumber daya alam yang rusak;
- e. Merajalelanya tokoh-tokoh yang rendah pendidikannya dan rusak moralnya.

## 7. Hakekat Politik.

Politik adalah berasal dari kata Yunani Polis yang secara harafiah berarti negara kota (City State). Pada zaman Yunani kuno, politik berkisar pada urusan pemerintahan negara yang masih sangat sederhana, meliputi negara, kota dan masyarakat.<sup>5</sup>Sedangkan arti menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, politik berarti ilmu mengenai sistem pemerintahan/dasar-dasar pemerintahan atau mengenai kebijakan-kebijakan tertentu dalam suatu negara.Perkembangan sekarang terbagi 2, yaitu politik sebagai ilmu (*political science*) dan politik sebagai filsafat (*political philosophy*).

## 8. Sejarah Politik Dunia dan Indonesia.

Sejarah politik merupakan sejarah yang mengkaji tentang masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan (termasuk partai-partai politik).Pendekatannya adalah sejarah intelektual, dengan pendapat bahwa pikiran-pikiran mempengaruhi perilaku. Ini berkembang menjadi sejarah mentalitas, sejarah intelektual bersifat pribadi tapi sejarah mentalitas bersifat kolektif.

Sejarah konstitusional, konstitusi suatu negara menerangkan pemikiran filsafat hidup dan dasar-dasar negara pada waktu didirikan.Sejarah institutional isinya adalah perangkat (lembaga, struktur, institusi) baik negara (kabinet, birokrasi, parlemen dan militer) dan non-negara (ormas, orsospol, LSM). Sejarah behavioraladalah sejarah perilaku, misalnya perilaku politik PKI dalam kebudayaan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berpendapat bahwa Indonesia memiliki 2 budaya politik yang dominan, yaitu Aristokrasi Jawa dan Wiraswasta Islam<sup>6</sup>. Sejarah koperatif ini adalah pendekatan perbandingan, misal perbandingan antara Golkar di Jatim dengan Golkar di Jabar.Sejarah sosial, mempelajari faktor-faktor sosial dalam masyarakat, aspirasi sosial dan kelompok-kelompok sosial yang ada (pengusaha, buruh, petani, ulama danlainnya).

---

<sup>5</sup>Jimmy Rungkat, *Theologia Politik Yesus* (Batu: Departemen LiteraturYPPH, 2010), p. 19.

<sup>6</sup>Nazarudin Syamsuddin, *Nazar* (Jakarta: PT GRAMEDIA, 1988), p. 34.

## 9. Perilaku Politik.

Adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Hubungan antara perilaku politik dan sikap politik, meski keduanya hampir mirip tapi ada beberapa perbedaan, yaitu:

- a. Sikap politik adalah kesiapan bereaksi terhadap objek lingkungan dan suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Sikap belum merupakan tindakan atau aktifitas, baru kecenderungan atau predisposisi;
- b. Sikap mengandung 3 komponen yaitu kognisi, afeksi dan konasi. Kognisi berkenaan dengan ide dan konsep, afeksi menyangkut kehidupan emosional dan konasi kecenderungan bertingkah laku;
- c. Sebagai contoh sikap politik menolak pemotongan anggaran pendidikan dan perilaku politik adalah peninjauan pernyataan keberatan, protes atau unjuk rasa. Ada juga sikap politik yang diam, disebut sebagai *silent majority*.

Masyarakat disebut sebagai partisipasi politik, yang melingkupi:

- a. Partisipasi politik terwujud sebagai kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati dan bukan berupa sikap dan orientasi;
- b. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik;
- c. Kegiatan yang berhasil maupun yang gagal dalam mempengaruhi keputusan politik pemerintah termasuk dalam partisipasi politik;
- d. Kegiatan mempengaruhi politik pemerintah dapat dilakukan secara langsung dan dilakukan dengan proses yang wajar tanpa kekerasan, dan dilakukan atas kesadaran sendiri.

## 10. Konsep Dasar Perwujudan Perilaku Politik.

Paham kelembagaan, yang menempatkan peran lembaga-lembaga politik pada posisi yang lebih penting daripada individu-individu politik. Lembaga-lembaga politik melakukan kegiatan sesuai dengan fungsinya masing-masing sedangkan individu yang

ada didalam lembaga itu hanya menjadi pelaksana semata.Paham behavioral, yang menempatkan individu-individu atau aktor-aktor politik menjadi motornya dan banyak memanfaatkan konsep-konsep psikologi dan sosiologi.

Ada perbedaan pendekatan paham kelembagaan dan paham behavioral sebagai berikut:

- a. Pendekatan paham kelembagaan:
  - Mengambil lembaga-lembaga politik sebagai unit analisis;
  - Lebih banyak bersandar pada filsafat;
  - Lebih bersifat historis yuridis;
  - Menekankan analksis kuantitatif;
  - Lebih mendasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma;
  - Lebih mengarah pada pengembangan ilmu terapan.
- b. Pendekatan paham behavioral
  - Mengambil individu sebagai satuan analisis;
  - Lebih bersandar pada hasil penelitian empiris;
  - Lebih diwarnai konsep2 sosisologis psikologis;
  - Menekankan analisis kualitatif;
  - Lebih mendasarkan pada fakta;
  - Lebih mengarah pada pengembangan ilmu murni.<sup>7</sup>

## 11. Inti Permasalahan Pendidikan dan Politik di Indonesia.

Dua hal yang terpisah namun pada prakteknya saling berkaitan satu dengan yang lain. Pertama, politik sebagai alat kontrol dalam sistem pemerintahan, dan pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan sehingga mau tidak mau pendidikan akan sangat terpengaruh oleh sistem politik negara pada satu masa dan sebaliknya politik juga terpengaruh oleh pendidikan dalam jangka panjang. Kedua, pendidikan di Indonesia tidaklah pernah terlepas dari politik dan politik sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh elit-elit politik dan partisipasi politik yang menghasilkan etika politik.

---

<sup>7</sup>Sudijono Sasatroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang, 1995), p. 28.

Pengertian elit politik adalah aktor politik yang memerintah dan membuat kebijaksanaan pada saat berkuasa. Elit dan kekuasaan tidak pernah terlepas satu dengan yang lain. Teori tentang elit dan kekuasaan, sebagai bagian yang penting dalam membangun konsep-konsep elit dan kaitannya dengan kekuasaan dalam sebuah sistem politik. Setelah konsep-konsep elit kemudian dikemukakan elit yang memerintah dan yang diperintah.

Proses transaksi kekuasaan, proses distribusi dan tawar-menawar merupakan bagian yang sangat penting dalam menciptakan sebuah sistem politik. Sedangkan partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh golongan elit penguasa, keterlibatan warga negara sebagai partisipasi politik relatif kecil dan kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Partisipasi politik berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi partisipasi yang bersifat sukarela (otonom) dan atas desakan orang lain (dimobilisasi). Nelson membedakan dengan 2 sifat, yaitu *autonomous participation* (partisipasi otonom) dan *mobilized participation* (partisipasi yang dimobilisasikan)<sup>8</sup>.

Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa akhirnya pendidikan di Indonesia tidaklah pernah terlepas dari elit-elit politik yang berkuasa pada saat itu. Konteks Indonesia, sejak Indonesia merdeka tahun 1945 ada perubahan-perubahan politik dalam setiap dekade. Politik zaman kemerdekaan/ perjuangan, politik Nasakom, politik orde baru, politik reformasi dan politik kerakyatan. Setiap perubahan politik mengakibatkan perubahan arah dan gaya pendidikan di Indonesia.

Konsep-konsep pembangunan politik yang ada dalam satu negara biasanya bisa digolongkan dengan:

- a. Pembangunan politik sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi;
- b. Pembangunan politik sebagai tipe masyarakat industri;
- c. Pembangunan politik sebagai modernisasi politik;
- d. Pembangunan politik sebagai operasi negara bangsa;

---

<sup>8</sup>Sasatroatmodjo, p. 77.

- e. Pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum;
- f. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi masa;
- g. Pembangunan politik sebagai pembinaan/ pendidikan bangsa;
- h. Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan yang teratur;
- i. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan;
- j. Pembangunan politik sebagai satu aspek perubahan sosial yang multidimensional<sup>9</sup>.

Perilaku politik penguasa akan menentukan arah pembangunan politiknya, konteks di Indonesia periode 2014-2019 diwarnai dengan pembangunan politik dalam bidang ekonomi, industri yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur yang besar-besaran.

Periode 2019-2024 rencana pemerintah akan masuk dalam pembangunan politik dalam bidang pembinaan dan pendidikan bangsa serta pembangunan administrasi dan hukum, yang ditandai dengan pengembangan SDM besar-besaran.

Kurikulum-kurikulum yang berubah setiap dekade politik. Pemimpin dan partai politik yang berkuasa akan sangat menentukan warna pendidikan saat itu. Sekarang kita masuk kurikulum yang berbasis kompetensi mengingat elit-elit politik diwarnai dengan person-person yang berkualitas dan profesional.

Politik rezim yang berkuasa akan mewarnai dunia pendidikan masa itu, entah itu sekuler atau agamis (dalam konteks Indonesia). Di negara-negara maju, faktor agama menjadi pudar dan politik hanya mewarnai ideologi/ konsep masyarakat seperti di Amerika Serikat antara konvensional dan demokrat. Pergantian kepemimpinan/ presiden dan kabinet tidak mengubah secara frontal bidang lain termasuk pendidikan.

Adanya pemisahan yang jelas antara agama dan sekuler, dan itu adalah dampak dari Revolusi Prancis dan abad sekularisme. Adrian, dalam Revolusi Prancis 1789 mengatakan bahwa dengan kedudukan dominan dalam pemerintahan Revolusioner Prancis antara 1793-1794, anggota kelompok Jacobin menjadikannya sebagai suatu agama politik.

---

<sup>9</sup>Sasatroatmodjo, p. 237.

Kebangsaan bercampur dengan nilai-nilai sakral, kebanyakan orang Jacobin tidak ateis, mereka percaya adanya Tuhan (*Deisme*), suatu agama yang didasarkan berdasarkan penalaran, moralitas dan hidup dengan kebajikan, tidak pada keyakinan tradisional Kristen tentang wahyu, kenabian dan kekuatan gaib. Roberspierre, pemimpin Jacobin yang paling terkenal, ingin menciptakan suatu masyarakat baru yang didasarkan pada kemurnian moral<sup>10</sup>.

Di Indonesia, sebaliknya faktor agama sangat dominan dalam segala hal termasuk dunia pendidikan. Bahkan dalam keKristenan juga muncul social Gospel, sasaran sosial yang dikembangkan Rauschenbusch bukan pengertian sosial sebagai suatu disiplin ilmu, tetapi mencakup keseluruhan kehidupan. Tidak hanya mempersoalkan santunan sosial atau terminologi sosial, tetapi menyeruak kedalam realitas yang sesungguhnya, keseluruh aras, bidang dan lingkungan kehidupan, totalitas manusia<sup>11</sup>.

Hampir 80 persen, pendidikan di Indonesia tidak pernah lepas dari faktor-faktor dan sentimen agama. Konteks Indonesia setidaknya peta politik Indonesia terdiri dari 3 hal yang penting, yaitu:

- a. Politik berbau kental agama;
- b. Politik nasionalis, dengan menempatkan agama secara pluralisme;
- c. Politik nasionalis agamis, perpaduan antara sekuler dan agama.

Bila golongan/ partai yang berdasar agama saja yang berkuasa, maka otomatis dunia pendidikan akan mengikuti menjadi agamis sekali. Sebaliknya bila yang politik nasionalis, maka pendidikan akan lebih mementingkan mutu siswa didik daripada pengajaran agama. Perpolitikan Indonesia diwujudkan dengan multi-partai, ada partai-partai nasionalis murni/ sekuler, partai nasionalis agamis dan partai agamis, misalnya:

- a. Partai Agamis adalah PKS;
- b. Partai Nasionalis Murni adalah PDIP;
- c. Partai Nasionalis Agamis adalah PKB.

---

<sup>10</sup>Saut Sirait, *Politik Kritis Di Indonesia Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), p. 170.

<sup>11</sup>Saut Sirait, p. 152.

Dan ketiga wajah partai ini terus berjuang dan saling berebut panggung kekuasaan. Dan proses mencapai panggung kekuasaan adalah pemilu per 5 tahun serentak diseluruh pelosok Indonesia, guna menentukan arah Indonesia kedepan termasuk didalamnya adalah dunia pendidikan.

Partai pemenang pemilu akan mewarnai semua hal di Indonesia termasuk didalamnya wajah pendidikan, karena Menteri Pendidikan akan sewarna dengan partai yang berkuasa waktu itu. Sebaliknya, pendidikan juga akan mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Masyarakat yang terdidik dan berpendidikan tinggi akan cenderung memilih partai yang rasionalis dan sekuler.

Masyarakat yang terdidik tidak mudah untuk dipengaruhi dan terkontaminasi oleh jargon-jargon dan slogan-slogan politik yang memakai agama sebagai label palsu. Pemerintah terus berusaha untuk memajukan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dikalangan keKristenan, politik dan pendidikan juga erat berpaut satu dengan yang lain.

Meski terkadang yang jadi masalahnya adalah beredarnya kesalahpahaman yang luas bahwa tidak ada hubungan diantara reformasi sebagai masalah jasmani dan teologi sebagai masalah rohani. Pemuda Kristen bisa berbicara banyak mengenai reformasi dan teologi, tetapi keduanya dianggap berada pada 2 dataran yang berbeda, yang tidak pernah akan saling bertemu. Kalau tidak salah, dikalangan pemuda Kristen terdapat 2 golongan: yang pertama katakanlah golongan evangelical yang diwakili oleh Perkantas dan golongan oikumenikal yang diwakili GMKI. Biasanya orang Perkantas pandai sekali berbicara teologis, tetapi kalau disuruh berbicara mengenai situasi era reformasi mereka tidak tahu apa-apa. Sebaliknya orang GMKI biasanya pandai berbahasa politik, tetapi kalau disuruh berbicara teologis, mereka tidak tahu apa-apa<sup>12</sup>.

Konteks Indonesia Now, jika Jokowi terpilih 5 tahun kedepan maka program utama bukan lagi pembangunan infrastruktur tapi pembangunan SDM Indonesia, dengan pendidikan sebagai tulang punggungnya seperti yang telah disampaikan dalam debat presiden dan dalam setiap kesempatan yang ada.

---

<sup>12</sup>Emanuel Gerrit Singgih, *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), p. 46.

Salah satu agenda yang terpenting, manusia Indonesia akan kuat bersaing dengan negara-negara lain dan juga akan semakin melek/ dewasa akan dunia politik dengan harapan tetap memilih partai-partai yang paling baik dan nasionalis, bukan fanatisme sempit.

## **KESIMPULAN**

Akhirnya, sebagai pelaku dan praktisi dalam dunia pendidikan, mari kita sambut dengan sukacita dan gempita berkat pembangunan SDM Indonesia 5 tahun kedepan dan tentunya sebagai orang percaya tetap *Soli Deo Gloria*, segala kemuliaan bagi Tuhan, amin. Dan juga harus ada mindset baru dalam kekristenan agar ada tokoh-tokoh Kristen yang berjuang di birokrasi pemerintahan, baik DPR maupun MPR serta birokrasi di daerah sampai sel yang terkecil RT dan RW. Terus berjuang dan berdoa supaya Indonesia kedepan akan tetap menjadi nasionalis yang mayoritas (NKRI) dan bukan warna radikalisme, kebencian antar ras dan agama yang berbeda.

Semoga uraian makalah yang singkat ini bisa menjadi sumbangsih yang besar bagi dunia teologi dan politik serta pendidikan yang terintegrasi dan tidak berubah sistem dan kurikulum setiap ganti menteri.

## **REFERENSI**

- Nazarudin Syamsuddin, *Nazar* (Jakarta: PT GRAMEDIA, 1988)
- Rahma, Putri, 'Sejarah Pendidikan Di Indonesia', 2015 <. Kompasiana.com, sejarah pendidikan di Indonesia> [accessed 30 June 2019]
- Rungkat, Jimmy, *Theologia Politik Yesus* (Batu: Departemen Literatur YPPII, 2010)
- Sara, Yolanda, 'Sejarah Pendidikan Dunia', 2019 <<https://www.academia.edu>> [accessed 12 June 2019]
- Sasatroatmodjo, Sudijono, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang, 1995)
- Saut Sirait, *Politik Kritis Di Indonesia Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000)
- Singgih, Emanuel Gerrit, *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000)